

**DAMPAK UJI COBA NUKLIR KOREA UTARA TERHADAP EKSPOR –
IMPOR KOREA UTARA DENGAN TIONGKOK**

Oleh:

Shafa' 'Arub Nadia

20140510138

Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55184
Email : shafa.arub.2014@fisipol.umy.ac.id

Abstract

This study aims to determine what factors are causing the decline of export-import value between North Korea and China. The decline in export-import value is influenced by North Korea's nuclear instrument as an instrument of diplomacy to the international world in order to achieve its national interest where the reason North Korea uses nuclear as a means of diplomacy is the reason for the survival regime, economic reasons and security reasons. The method used by the author is the content analysis with the collection of information, looking for references related to the cases discussed. The author uses the theory of International Politics in this research.

The results of this study indicate that the UN Security Council resolution NO. 2094 and the threats posed by countries in the outside world to North Korea are the factors that lead to declining export and import values between North Korea and China. The UN Security Council passed the 2094 resolution in response to a North Korea nuclear test in 2013 that has been seen as a world threat and threats from the world's nations to North Korea as they consider the nuclear test conducted by North Korea can pose a threat to the national security of each country.

Keywords : North Korea Nuclear Test, North Korea, China, International Politics Theory, China – North Korea Relations, United Nations

Pendahuluan

Isu uji coba nuklir Korea Utara bukanlah menjadi isu yang baru, melainkan sudah menjadi isu lama yang belum dapat diselesaikan. Korea Utara telah menjadikan nuklir sebagai instrumen diplomasi terhadap dunia internasional demi meraih kepentingan nasionalnya. Alasan Korea Utara menggunakan nuklir sebagai alat diplomasi adalah untuk menggaransi rezim komunis yang ada di negaranya, untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari luar karena Korea Utara dikenal sebagai negara yang miskin, dan yang terakhir adalah alasan keamanan untuk dapat mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya (Zuhri, 2010).

Masalah nuklir Korea Utara tersebut direspon oleh negara-negara didunia internasional salah satunya adalah Tiongkok. Tiongkok dan Korea Utara dikenal sebagai sekutu dekat. Hubungan bilateral keduanya terbilang dekat meskipun sebenarnya jika dilihat kembali, posisi Korea Utara tidak terlalu menguntungkan bagi Tiongkok meskipun hubungan tersebut masih dipertahankan hingga saat ini. Dalam hubungan kemitraannya yang erat antara Tiongkok dengan Korea Utara, Tiongkok dianggap memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan negara lain untuk menekan Korea Utara karena Tiongkok merupakan rekan dagang utama bagi Korea Utara. Akan tetapi, sikap Tiongkok terhadap Korea Utara mulai berubah ketika pada 12 Februari 2013, media Korea Utara mengumumkan bahwa negara tersebut telah melancarkan uji coba nuklir bawah tanah yang merupakan uji coba ketiganya dalam rentang waktu tujuh tahun (Winata, 2014).

Setelah terjadinya uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 tersebut pun, hubungan perdagangan antara Korea Utara dan Tiongkok masih terus berlanjut hingga saat ini. Akan tetapi hubungan yang terjalin tersebut semakin lama semakin menjauh. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan terhadap nilai ekspor dan impor antara Korea Utara dengan Tiongkok dari tahun 2014 – 2015 (Boydston, 2017).

Dinamika Proliferasi Nuklir Korea Utara

Nuklir Korea Utara mulai terbentuk setelah Korea Utara merdeka dan setelah berakhirnya Perang Korea, barulah Kim Il Sung yang merupakan pemimpin pertama Korea Utara membangun program nuklir dengan bantuan Uni Soviet. Mereka saling bertukar ilmuwan nuklir dengan Uni Soviet. Namun pada akhir 1960an dan awal 1970an, Uni Soviet dan Tiongkok, yang juga merupakan sekutu Korea Utara dalam pengembangan nuklir mengalami perpecahan dimana Pyongyang yang menghendaki adanya *self-determination* dalam membangun program nuklirnya tanpa bantuan siapapun (Hartati, 2013). Korea Utara mencoba untuk mengembangkan energi nuklirnya karena, nuklir dianggap sebagai salah satu cara untuk membuat negara tersebut memiliki kekuatan oleh karena itu, Korea Utara menggunakan nuklir sebagai instrumen diplomasi politik internasionalnya. Korea Utara memilih nuklir sebagai instrumen diplomasinya karena nuklir dianggap mempunyai nilai tawar yang cukup tinggi dan nuklir juga dapat dijadikan sebagai suatu instrumen kekuasaan negara yang optimal.

Kemudian pada tahun 1985, Korea Utara menandatangani kesepakatan bersama IAEA untuk tidak melakukan penyebaran pengembangan nuklir. Perjanjian tersebut adalah NPT (Nuclear Non-proliferation Treaty). Korea Utara menandatangani perjanjian dengan IAEA untuk melaporkan keadaan program nuklirnya secara wajib dengan IAEA dimulai pada Januari 1992 dengan menandatangani *safeguard agreement*. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Korea Utara menyampaikan laporan awal mengenai program nuklirnya. Akan tetapi pada tahun 2003, Korea Utara mengundurkan diri dari NPT pada masa kepemimpinan Kim Jong Il karena George W. Bush, melakukan tindakan yang konfrontatif dengan menyebut Korea Utara memiliki program nuklir berbasis uranium yang mampu diformulasikan menjadi senjata nuklir yang ofensif (D.Chaffee, 2012).

Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ketiga pada tahun 2013, dimana sebelumnya Korea Utara pernah melakukan uji coba nuklirnya pada tahun 2006 dan 2009. Pada tanggal 5 Juli 2006 masyarakat internasional dikejutkan dengan aksi peluncuran peluru kendali Korea Utara, yang sekaligus merupakan puncak dari krisis nuklir yang telah berlangsung sebelumnya (Puimara, 2008). Korea Utara memang sudah mulai melakukan pengembangan nuklirnya sejak tahun 1965, akan tetapi baru tahun 2006 tersebut Korea Utara mulai melakukan uji coba nuklirnya untuk yang pertama kali. Kemudian untuk menanggapi adanya uji coba nuklir Korea Utara tahun 2006 ini, DK PBB mengeluarkan sanksinya dalam resolusi DK PBB No. 1874.

Setelah uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 2006, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklirnya yang kedua yaitu pada 25 Mei 2009 dan sebelumnya tanggal 5 April 2009, Korea Utara juga meluncurkan rudal balistik jarak jauh, Taepo Dong 2, di atas Jepang, tetapi gagal mencapai pengujian lengkap sistem atau menempatkan satelit ke orbit (Command, 2015). Menanggapi aksi Korea Utara tersebut, Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan pernyataan kecamannya dan menegaskan bahwa peluncuran roket Korea Utara telah melanggar resolusi DK PBB nomor 1718 (Zuhri, 2010). Kemudian untuk menanggapi uji coba nuklir Korea Utara tahun 2009 tersebut, DK PBB mengeluarkan resolusi 1874 yang berisi tentang mempererat sanksi sebelumnya yaitu sanksi yang ada pada resolusi 1718, yang mana mengembangkan embargo persenjataan dengan melarang semua impor dan ekspor senjata, terkecuali persenjataan kecil dan menetapkan bahwa negara harus melapor pada Dewan Keamanan sebelum menjual senjatanya pada Korea Utara (Sudirman, 2016, hal. 41).

Kemudian pada 12 Februari 2013, seorang juru bicara komando militer Korea Utara mengatakan telah berhasil melakukan uji coba senjata nuklir bawah tanah ketiga. Korea Utara juga mengatakan bahwa tes itu menggunakan perangkat nuklir miniatur dengan kekuatan

eksplosif yang lebih besar. Uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara ini dianggap sebagai uji coba nuklir terbesar yang pernah dilakukan oleh Korea Utara apabila dibandingkan dengan uji coba nuklir sebelumnya (Yesaya Anggia A. R., 2016). Tidak hanya dari kawasan, dari dunia internasional yang lebih luas, tindakan nuklir Korea Utara mengundang berbagai kritik keras dan peringatan. Ancaman embargo dan isolasi yang diberlakukan pada Korea Utara akan semakin mendalam bila Korea Utara tidak benar-benar secara penuh menghentikan uji coba nuklirnya.

Berbagai ancaman dan sanksi diberikan untuk Korea Utara, baik itu dari negara-negara luar maupun dari DK PBB. Untuk menanggapi uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, DK PBB mengeluarkan resolusinya nomor 2094. Sanksi yang berada dalam resolusi DK PBB tersebut berisi tentang memperkuat sanksi-sanksi sebelumnya yaitu resolusi DK PBB 1718 dan 1874. Tindakan termasuk memperjelas hak negara untuk menyita dan menghancurkan material yang dicurigai menuju ke atau dari Korea Utara yang bertujuan mengembangkan senjata ataupun penelitian. Mempertegas kembali larangan bepergian atas orang-orang yang dicurigai terkait dengan program nuklir Korea Utara (Sudirman, 2016, hal. 41).

Dinamika Perdagangan Bilateral Korea Utara Dengan Tiongkok

Korea Utara merupakan salah satu negara miskin di dunia, hal inilah salah satu alasan Korea Utara mendapat banyak bantuan dari Tiongkok dalam bidang perekonomian, khususnya perdagangan dan dapat dibuktikan berdasarkan Badan Intelejen Pusat Amerika Serikat yang mencatat bahwa lebih dari 75% perdagangan Korea Utara adalah dengan Tiongkok (Sugiyono, 2008). Korea Utara juga mendapatkan bantuan seperti minyak dalam jumlah besar dan makanan tiap tahunnya dari Tiongkok. Jadi, dapat dikatakan bahwa Korea Utara bertahan hidup dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Tiongkok. Dalam

kegiatan perdagangan antar kedua negara tersebut, Beijing lebih banyak mengekspor batu bara dan mineral dari Pyongyang, menyuplai makanan dan bahan bakar yang krusial untuk penduduk Korea Utara (Vaswani, 2017). Hal inilah salah satu penyebab kenapa Korea Utara tidak dapat melepaskan kerjasama dengan Tiongkok. Selain itu, Tiongkok yang saat ini dikenal sebagai kekuatan ekonomi baru dimana apabila terdapat sesuatu yang akan mempengaruhi Tiongkok maka mungkin juga akan mempengaruhi dunia internasional.

Meskipun Korea Utara merupakan negara kecil yang tidak banyak menguntungkan bagi Tiongkok, namun hubungan bilateral antara kedua negara tersebut tetap dipertahankan. Bahkan meskipun Korea Utara telah melakukan tindakan melanggar norma-norma internasional terkait nuklir, namun Tiongkok tidak pernah memutus hubungan bilateralnya ini (Yesaya Anggia, 2016). Selain menjadi rekan dagang utama Korea Utara, Tiongkok juga ikut serta membantu untuk menjaga stabilitas rezim komunis yang ada di Korea Utara dimana Tiongkok juga memiliki rezim yang sama dengan Korea Utara. Hal ini terjadi, karena kedua negara tersebut menyadari adanya ancaman terhadap rezim komunis di negara masing-masing. Perlindungan terhadap rezim Komunis yang dilakukan oleh Tiongkok ini, dilakukan dengan alasan bahwa jika makin banyak rezim komunis yang jatuh, maka akan semakin sulit pula bagi Tiongkok untuk mengukuhkan legitimasinya (Sudirman, 2016).

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Tiongkok untuk mempertahankan rezim Korea Utara adalah pada saat Tiongkok memberikan sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara karena pendekatan kooperatif dianggap tidak lagi mampu meyakinkan Korea Utara untuk berhenti melakukan provokasi nuklir. Dimana pada saat Tiongkok menyetujui pemberian sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara dalam kasus uji coba nuklir tersebut, namun prinsip non – intervensi dan penyelesaian konflik secara damai masih memberikan pengaruh terhadap sikap Tiongkok. Tiongkok menekankan pada pemberian sanksi yang menjamin adanya insentif untuk melakukan negosiasi dan dialog dalam menyelesaikan isu

denuklirisasi. Bagi Tiongkok pemberian sanksi bukanlah instrumen utama yang digunakan untuk memaksa Korea Utara melakukan denuklirisasi, namun denuklirisasi hanya bisa dicapai melalui negosiasi dan konsultasi. Selanjutnya Tiongkok juga menekankan bahwa sanksi yang diberikan harus secara langsung membidik pengembangan program nuklir, dan menjamin agar keberlangsungan rezim pemerintahan Pyongyang dan keselamatan masyarakat sipil tidak terganggu akibat sanksi tersebut (Mahrita, 2016).

Disisi lain, sejak terpecahnya Korea Utara dengan Korea Selatan, Korea Utara berubah menjadi sebuah negara yang sangat tertutup, sehingga komunikasi antara Korea Utara dan dunia luar terutama Korea Selatan sangat minim dan dikontrol dengan ketat. Usaha-usaha untuk meredakan ketegangan atau konflik kedua Negara tetap dilakukan mengingat posisi Korea Utara semakin terkucilkan dalam pergaulan internasional akibat pandangan negatif dunia internasional sejak Korea Utara mulai melakukan program nuklirnya yang diteruskan dengan pengembangan kemampuan rudal dengan serangkaian uji coba serta memburuknya situasi politik dan ekonomi Korea Utara pada saat itu (Widyasari, 2012). Kemerosotan Korea Utara terjadi sejak tahun 1990-an dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama bilateral dengan mitra dagang utamanya, yaitu USSR serta munculnya pengaruh dari Eropa Timur yang mengkombinasikan peristiwa kelaparan akibat dari terjadinya peristiwa bencana banjir yang terjadi secara berturut-turut pada tahun 1996, 1997, dan 2000 di Korea Utara (Zuhri, 2010, hal. 2).

Hal ini ditambah dengan kondisi saat ini dimana setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya dan terus mengembangkan energi nuklirnya, banyak perusahaan-perusahaan asing yang mencabut investasinya yang ada di Korea Utara. Selain itu, banyak negara – negara luar yang mencoba untuk menghentikan perdagangannya dengan Korea Utara. Tidak dipungkiri lagi bahwa Korea Utara merupakan salah satu negara miskin didunia. Selain itu akibat dari adanya uji coba nuklir tersebut, banyak diplomat Korea Utara yang diusir dari

negara-negara luar maupun mengurangi hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara seperti Spanyol, Peru, Meksiko, Mesir, dan lain lain (Essra, 2017).

Akan tetapi berbeda dengan Korea Utara, perkembangan ekonomi China yang begitu cepat dalam rentang waktu 30 tahun sering dituliskan para analis sebagai salah satu kisah sukses pembangunan ekonomi pada masa modern. Sejak tahun 1978 (ketika reformasi kebudayaan mulai dilakukan) hingga tahun 2008, GDP China rata-rata meningkat 10% setiap tahunnya. Dari tahun 1980 hingga 2008, perekonomian China tumbuh 14 kali. China kini merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Para peneliti bahkan memprediksi bahwa China akan menjadi yang terbesar dalam beberapa dekade mendatang. Pada tahun 1980 perekonomian China menggunakan sistem perekonomian terbuka dan menjadikan China sebagai negara yang tingkat pertumbuhannya tertinggi di dunia. Sejak sistem perekonomian China berubah menjadi sistem perekonomian terbuka pada tahun 1980, China mengalami pertumbuhan yang pesat yang terlihat pada gambar diatas. Pada tahun 2005 China terus mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan total GDP sebesar USD 1.731,13 miliar. Hal ini menjadikan China sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia sebesar 11,4% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 10,1% dengan total GDP sebesar USD 1.490,38 miliar (Linda, 2010).

Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman, Korea Utara semakin membuat dunia Internasional terancam akibat uji coba nuklir yang dilakukannya, terutama uji coba nuklir Korea Utara pada tahun 2013 yang membuat Tiongkok mulai merasa khawatir terhadap keamanan nasionalnya. Meskipun pada awalnya Tiongkok masih memberikan keringanan dan pembelaan terhadap uji coba nuklir yang pernah dilakukan oleh Korea Utara sebelumnya yaitu pada tahun 2006 dan 2009, akan tetapi hal ini berbeda pada saat Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ketiga pada tahun 2013 karena dinilai sebagai uji

coba terdahsyat yang pernah dilakukan apabila dibandingkan dengan uji coba sebelumnya (Winata, 2014).

Tiongkok merasa bahwa dengan adanya uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 tersebut merupakan sumber ancaman bagi stabilitas kawasan regional Asia Timur terlebih lagi karena Korea Utara semakin melakukan perlawanan apabila mendapat kecaman untuk segera menghentikan program nuklirnya tersebut. Oleh karena itu, Tiongkok merasa harus mengambil langkah tegas terhadap Korea Utara melalui peran aktifnya dalam merancang butir sanksi Resolusi DK PBB nomor 2094. Tiongkok memilih aktif berkontribusi dalam forum DK PBB dengan berinisiatif untuk berkolaborasi dengan Amerika Serikat merancang sanksi yang lebih ketat melalui Resolusi 2094. Tidak hanya inisiatif untuk merancang, tetapi Tiongkok juga turut menerapkan serangkaian kebijakan sesuai dengan Resolusi 2094 DK PBB yang secara khusus. Berikut merupakan penerapan sanksi yang sudah dilakukan oleh Tiongkok kepada Korea Utara sesuai dengan Resolusi DK PBB 2094. Dalam merancang resolusi DK PBB No. 2094 ini, Amerika Serikat berusaha keras untuk menekankan kerjasama dengan Tiongkok dalam menyusun draft, bahkan memperkenalkan rancangan resolusi tersebut seperti yang disetujui oleh Amerika-Tiongkok, yang sangat berbeda dengan beberapa revisi Tiongkok terhadap draf awal resolusi sanksi seperti yang diajukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2006.

Tabel 3.1 Realisasi Penerapan Sanksi Tiongkok terhadap Korea Utara sesuai dengan Resolusi DK PBB 2094

Kontrol arus pertukaran manusia	Pembatasan pemberian visa bagi pekerja asal Korea Utara sejak Februari 2014. Pembatasan ini secara langsung berdampak buruk bagi 12,17 juta pekerja asal Korea Utara yang siap bekerja di Tiongkok.
Kontrol pasukan ekspor minyak	Menghentikan aliran minyak mentah pada periode 6 bulan pertama di tahun 2014.

Sumber : Strait Times, 2013; New York Times, 2013; Liou, 2014; The Hankyoreh, 2014

Selain itu, dukungan yang diberikan Tiongkok terhadap resolusi DK PBB No. 2094 adalah: (1) Tiongkok memanggil duta besar Korea Utara dan menyerukan pembicaraan mengenai denuklirisasi; (2) Tiongkok menerapkan sanksi Resolusi 2094 dengan tidak mengekspor barang mewah seperti perhiasan (emas dan permata), Tiongkok hanya mengekspor perak, perhiasan imitasi dan lukisan yang jumlahnya tidak lebih dari US\$ 322 ribu; (3) Tiongkok melakukan embargo minyak mentah terhadap Korea Utara tahun 2014 (Isnaeni, 2017).

Dalam menanggapi uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara khususnya uji coba nuklir yang dilakukan pada tahun 2013, Tiongkok juga mulai menerapkan sejumlah sanksi dagang terhadap Korea Utara dalam wujud pembatasan pasokan bahan bakar minyak dan penghentian pembelian tekstil. Sanksi yang diberikan oleh Tiongkok ini ditengarai akan semakin membuat perekonomian Korea Utara menurun, karena dalam waktu yang sama Korea Utara juga mendapatkan sanksi – sanksi yang berasal dari negara Barat. Meskipun awalnya Tiongkok dan Rusia menolak usulan Amerika Serikat untuk menghentikan ekspor minyak ke Korea Utara, namun pada akhirnya kedua negara tersebut sepakat untuk membatasinya (Indonesia, 2017). Dalam sanksinya tersebut, Tiongkok juga mengontrol perdagangan di perbatasan Tiongkok – Korea Utara, seperti penutupan rekening perdagangan luar negeri Bank Korea Utara dan menghentikan transaksi keuangan terkait dengan pengembangan nuklir dan rudal oleh Bank of China, China Construction Bank, dan Bank BUMN lainnya; Menerapkan mekanisme pemeriksaan kargo dari dan menuju Korea Utara; dan Menerbitkan dokumen sebanyak 236 halaman yang berisi daftar produk dan teknologi yang dilarang untuk diekspor ke Korea Utara pada September 2013. Pemberlakuan sanksi dagang ini dilakukan supaya dapat menekan perekonomian Korea Utara.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Uji Coba Nuklir Berdampak Terhadap Menurunnya Nilai Ekspor-Impor Korea Utara Dengan Tiongkok

Menurunnya nilai ekspor dan impor antara Korea Utara dengan Tiongkok disebabkan oleh beberapa faktor seperti sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yaitu resolusi DK PBB No. 2094 yang merupakan tanggapan dari uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tahun 2013 dan ancaman – ancaman yang diberikan oleh negara – negara luar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia. DK PBB mengeluarkan sanksi yang dianggap paling keras bagi pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara yaitu Resolusi No. 2094, karena resolusi yang sebelumnya pernah dikeluarkan oleh DK PBB untuk Korea Utara tidak pernah ditanggapi dengan serius sehingga Korea Utara tetap melakukan uji coba nuklirnya.

Resolusi DK PBB 2094 ini merupakan pemberlakuan sanksi atas Korea Utara yang telah diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada Maret 2013 untuk lebih memperketat tingkat sanksi keuangan dan perdagangan dibandingkan resolusi sebelumnya. Resolusi tersebut memuat sanksi tambahan terhadap pemeriksaan baik kapal maupun pesawat terbang yang dicurigai atas pengangkutan barang larangan berkaitan dengan pengembangan nuklir dan rudal balistik. Bahkan, berdasarkan resolusi nomor 2094 tersebut, kapal dan pesawat terbang yang diduga dilarang lepas landas dan mendarat (Radio, 2013).

Selain resolusi DK PBB No. 2094, ancaman – ancaman dari negara luar terhadap Korea Utara juga merupakan salah satu faktor menurunnya nilai ekspor dan impor antara Korea Utara dengan Tiongkok. Seperti Jepang, yang menganggap uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 ini merupakan ancaman serius bagi Jepang dan tantangan serius terhadap kerangka kerja pelucutan senjata internasional berdasarkan perjanjian NPT. Dalam menanggapi uji coba nuklir tersebut, Jepang dengan tegas mengecam adanya uji coba nuklir tersebut dan melakukan demonstrasi (Payne, 2013). Selain melakukan demonstrasi terhadap

aksi uji coba nuklir Korea Utara tersebut, Jepang juga mendesak negara-negara yang ada di dunia untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara.

Meskipun Korea Utara dan Tiongkok memiliki hubungan yang sangat dekat, akan tetapi apabila Korea Utara tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain selain Tiongkok, maka Tiongkok juga tidak bisa melakukan kerjasama yang baik dengan Korea Utara karena hal tersebut justru akan memberikan kerugian terhadap Tiongkok seperti dunia internasional yang ikut serta membenci Tiongkok karena tetap mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara yang akan berpengaruh langsung terhadap kepentingan nasional Tiongkok itu sendiri.

Berbeda dengan Jepang, tanggapan Amerika Serikat terhadap uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 yaitu dengan memberikan Sanksi Amerika membekukan semua kepentingan properti Korea Utara di Amerika Serikat, melarang sebagian besar impor barang dan jasa dari Korea Utara, dan melarang transaksi Amerika dengan nama-nama apapun dalam daftar hitam bisnis Korea Utara dan individu-individu yang dicurigai melakukan kegiatan ilegal termasuk pencucian uang, pemalsuan, penyelundupan mata uang dan perdagangan narkoba (Times, 2013). Selain itu, Amerika juga memberikan sanksi terhadap Korea Utara yaitu, menempatkan Korea Utara dalam daftar mengenai "*primary money laundering concern*" dan menutup akses Korea Utara terhadap sistem keuangan internasional untuk mencegah negara Korea Utara menggunakan bank untuk mencuci uang yang dapat digunakan untuk program senjata nuklirnya (World, 2016).

Jika penutupan akses terhadap sistem keuangan tersebut berhasil diaplikasikan dan tetap berjalan, maka Korea Utara akan mengalami kendala apabila ingin melakukan peminjaman uang baik itu untuk memproduksi (cari produk ekspor utama korea utara) maupun untuk mengembangkan energi nuklirnya. Hal ini juga akan berpengaruh apabila Korea Utara tidak dapat memproduksi barang yang seharusnya diekspor ke luar negeri

khususnya Tiongkok seperti biji besi dan batu bara, maka hal itu juga akan mempengaruhi kerjasama perdagangan diantara kedua negara tersebut menjadi tidak stabil. Disisi lain, Amerika juga terus mendesak Tiongkok untuk dapat meyakinkan Korea Utara supaya dapat menghentikan pengembangan energi nuklirnya.

Yang terakhir, Indonesia menanggapi uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 tersebut dengan mengaktifkan kembali *Six Party Talks* atau Perundingan Enam Negara yang beranggotakan Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan Tiongkok sebagai mekanisme dialog untuk menghindarkan kemungkinan uji coba nuklir itu mengarah pada instabilitas kawasan dan pengaktifan kembali Perundingan Enam Negara ini juga merupakan sikap tegas yang diberikan oleh ASEAN Regional Forum (ARF) terhadap adanya uji coba nuklir Korea Utara tersebut (Kompas.com, 2013). Apabila perundingan tersebut diaktifkan kembali, maka tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi berat terhadap Korea Utara, karena *Six Party Talks*/Perundingan Enam Negara tersebut merupakan negosiasi multilateral untuk membahas penanggulangan program nuklir Korea Utara. Peralnya, sebelumnya *six party talks* terkesan mati dan tak bisa memberikan kontribusi apapun di samping Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Korea Selatan serta Jepang, yang sangat menentang program nuklir Korea Utara (Michaela, 2017). Akan tetapi dengan adanya pengaktifan kembali perundingan tersebut, maka akan mempengaruhi hubungan bilateral antara Korea Utara dengan Tiongkok karena Tiongkok juga merupakan anggota dari *Six Party Talks* dan apabila Korea Utara merasa dirugikan atas sanksi atau hasil perundingan yang diberikan maka bukan tidak mungkin hubungan antara Korea Utara dengan Tiongkok juga akan semakin buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Boydston, K. (2017, Agustus 18). *North Korea: Witness to Transformation*. Dipetik Maret 16, 2018, dari North Korea-China Trade: What Will Be Sanctioned Next? : <https://piie.com/blogs/north-korea-witness-transformation/north-korea-china-trade-what-will-be-sanctioned-next>
- Command, N. H. (2015, April 13). *Naval History and Heritage Command*. Retrieved Maret 25, 2018, from North Korea's Second Nuclear Test : <https://www.history.navy.mil/research/library/online-reading-room/title-list-alphabetically/n/north-koreas-second-nuclear-test-2009.html>
- D.Chaffee. (2012, 4 4). *North Korea's Withdrawal from Nonproliferation Treaty Official*. Dipetik 1 4, 2018, dari www.wagingpeace.org: http://www.wagingpeace.org/articles/2003/04/10_chaffee_korea-npt.htm
- Essra, T. R. (2017, September 19). *Antaraneews.com*. Dipetik Maret 26, 2018, dari Daftar Negara yang Usir Duta Besar Korea Utara setelah Uji Coba Nuklir: <https://www.antaraneews.com/berita/653495/daftar-negara-yang-usir-duta-besar-korea-utara-setelah-uji-coba-nuklir>
- Hartati, A. Y. (2013). *Propaganda Nuklir Korea Utara (Studi Perlawanan Korea Utara terhadap Amerika Serikat)*. Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Indonesia, B. (2017, September 23). *Berita : Cina memberlakukan sanksi dagang terhadap Korea Utara*. Dipetik Januari 16, 2018, dari Cina memberlakukan sanksi dagang terhadap Korea Utara: <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41370754>
- Isnaeni, N. A. (2017). DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR KOREA UTARA TERHADAP HUBUNGAN BILATERALNYA DENGAN TIONGKOK TAHUN 2013 – 2015. *Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2017*, 51.
- Kompas.com. (2013, Februari 19). *Home : Nuklir Korea, Indonesia, dan ASEAN*. Dipetik Februari 5, 2018, dari Nuklir Korea, Indonesia, dan ASEAN: tekno.kompas.com/read/2013/02/19/02403616/nuklir.korea.indonesia.dan.asean
- Linda. (2010). VALUES DALAM DIPLOMASI EKONOMI CHINA . *Jurnal LINGUA CULTURA Vol.4 No.1* , 91.
- Mahrita. (2016). Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terkait Uji Coba Nuklir Ketiga Korea Utara Tahun 2013 . *Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol.5 No.2, Juni 2016* , 542.
- Michaela, S. (2017, April 25). *Asia : Six Party Talks Dibutuhkan untuk Selesaikan Isu Korea Utara* . Dipetik Februari 7, 2018, dari Six Party Talks Dibutuhkan untuk Selesaikan Isu Korea Utara : <http://internasional.metrotvnews.com/read/2017/04/25/691241/six-party-talks-dibutuhkan-untuk-selesaikan-isu-korea-u>
- Payne, E. (2013, Februari 12). *CNN.com : World leaders react to North Korea's nuclear test*. Dipetik Februari 5, 2018, dari World leaders react to North Korea's nuclear test: <https://edition.cnn.com/2013/02/12/world/north-korea-nuclear-reax/index.html>
- Puimara, L. E. (2008). Kebijakan Korea Selatan terhadap Krisis Nuklir Semenanjung Korea. *Jurnal FISIP UI*, 1.

Radio, K. W. (2013, Maret 8). *Ulasan Hari ini : Resolusi nomor 2094 terhadap Korut lebih diperketat daripada resolusi sebelumnya*. Dipetik Februari 6, 2018, dari Resolusi nomor 2094 terhadap Korut lebih diperketat daripada resolusi sebelumnya:
http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_newsthema_detail.htm?lang=i&id=news_newsthema&No=105748¤t_page=147

Sudirman, A. N. (2016). HUBUNGAN DAN KEPENTINGAN TIMBAL-BALIK RRT-KOREA UTARA DI SEMENANJUNG KOREA. *SKRIPSI HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN*, 6-7.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bnadung: Alfabeta.

Times, T. N. (2013, April 16). *Asia Pasific : In Focus: North Korea's Nuclear Threats* . Dipetik Februari 6, 2018, dari In Focus: North Korea's Nuclear Threats :
www.nytimes.com/interactive/2013/04/12/world/asia/north-korea-questions.html

Vaswani, K. (2017, 9 5). *BBC Indonesia*. Retrieved 1 10, 2018, from Apa yang terjadi jika Trump menghukum rekan dagang Korut?: <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41157939>

Widyasari, L. (2012). DINAMIKA HUBUNGAN KOREA SELATAN-KOREA UTARA DALAM MEWUJUDKAN REUNIFIKASI DI SEMENANJUNG KOREA PERIODE 2003-2008. *Skripsi HI UIN Syarif Hidayatullah*, 24-25.

Winata, H. (2014). UPAYA PBB DALAM MENGHENTIKAN PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA TAHUN 2009-2013 . *Jom FISIP Vol. 1 No. 2 Oktober 2014*, 2.

World, F. N. (2016, Juni 1). *Asia : US designates North Korea 'primary money laundering concern'*. Dipetik Februari 6, 2018, dari US designates North Korea 'primary money laundering concern': <http://www.foxnews.com/world/2016/06/01/us-designates-north-korea-primary-money-laundering-concern.html>

Yesaya Anggia, A. R. (2016). Hubungan Asimteris Tiongkok dan Korea Utara dalam Isu Nuklir Korea Utara Tahun 2013 . *Jurnal Hubungan Internasional, Tahun IX, No.1*, 55.